

PENGARUH UPAH MINIMUM DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAWA TIMUR

M. Khoirus Sholihin, Bambang Wiwoho

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Khoirussholihin91@gmail.co, biwoho@untag_sby.ac.id

Abstrak

The influence of the minimum wage and unemployment rate on the number of poor people in East Java Province still needs to be considered because poverty is a global humanitarian problem and is still a central issue in any part of the world. Besides being latent and actual, poverty is a socio-economic disease that is not only experienced by developing countries but also in developed countries. This research uses a quantitative research type. This research was conducted in East Java Province using East Java BPS data. While the data collection method uses BPS data and articles related to research that is almost the same as this study. The variables used in this study are Minimum Wage (X1), Unemployment Rate (X2), and Total Poverty (Y). Analysis of the data used in this study is Multiple Linear Regression with a significant level of 5%. The results showed that partially Minimum Wage (X1) with a significant level of 0.004 and Total Unemployment (X2) with a significant level of 0.237, the minimum wage affects the poverty variable (Y) significantly. While partially the number of unemployed variables (X2) with a significant level of 0.237, the number of unemployed does not affect the poverty variable (Y). Furthermore, the variables (X1) and (X2) simultaneously affect the poverty variable (Y).

Keywords: Wages, unemployment, poverty.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang melainkan negara maju. Di Indonesia kemiskinan masih merupakan masalah yang perlu di atasi bersama tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi yakni mencapai 16,58 persen pada tahun 2010. Namun

dalam beberapa tahun terakhir persentase kemiskinan di Indonesia cenderung menurun di setiap tahunnya dimana pada tahun 2010 tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 16,58 persen. Kemudian pada tahun 2008 sedikit mengalami penurunan menjadi 15,42 persen. Penurunan ini terus terjadi hingga tahun 2018 dimana persentase kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 10,96 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2018) Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan.

Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena masyarakat itu sendiri yang kurang produktif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga susah untuk keluar dari kemiskinan. Dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan jumlah penduduk di Jawa Timur dimana tahun 2008 sebesar 19.223.833 jiwa, jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 penduduk Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 39.272.972 jiwa dan pada tahun 2018 sebesar Rp 40.020.001 jiwa. Sumber dilihat dari tabel Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS) Jawa Timur. Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh (Sumarsono, 2003 h. 23). Ketika

upah riil berada di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Kekuatan upah riil mengurangi tingkat perolehan kerja dan mempertinggi pengangguran. Pengangguran yang disebabkan oleh kekuatan upah dan penajatan pekerjaan disebut pengangguran struktural. Ketika pemerintah mempertahankan agar upah tidak mencapai tingkat keseimbangan maka dapat menimbulkan kekakuan upah. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur cenderung turun selama tahun 2008-2018. Dimana tahun 2008 jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur sebesar 237.061 jiwa, jumlah ini turun menjadi 211.356 jiwa pada tahun 2009, penurunan ini disebabkan oleh adanya pembukaan lapangan pekerjaan di sektor swasta seperti perusahaan listrik, industri serta sektor pemerintahan seperti pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN. Pada tahun 2012 jumlah pengangguran di Jawa Timur meningkat 173.624 jiwa, dan hingga tahun 2017 yaitu jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur tercatat 147.031 jiwa. Terjadi fluktuasi tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur salah satunya disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan perluasan

kesempatan kerja sehingga masyarakat yang terpaksa harus menganggur.

LANDASAN TEORI

Pengertian Upah

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah tetapi juga lembur dan tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk tunjangan hari raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin (Badan Pusat Statistik. Secara umum sistem upah menurut Gilarso (2003, .h 5-6) adalah sebagai berikut:

1).Upah Menurut Prestasi (upah potongan)

Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan jika hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakai, dan lain-lain).

.2).Upah Waktu

Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per potong.

3).Upah Borongan

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya, untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain

4).Upah Premi

Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi "normal" berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, pekerja tersebut diberi "Premi". Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan *time and motion study* (waktu dan studi gerak).

5).Upah Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu. Misalnya, pekerja atau pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih dan direksi sebuah PT mendapat *tantieme* (bagian laba yang diberikan pemegang saham) bahkan kaum buruh dapat diberi saham dalam PT tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan.

6).Upah pegawai Negeri

Upah Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip yaitu pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

PENGANGGURAN.

Pengangguran dibedakan dalam dua pengertian pengangguran terselubung atau tersembunyi pengangguran musiman. Pengangguran terselubung atau tersembunyi biasanya diartikan sebagai golongan tenaga kerja yang produktivitas marjinalnya adalah nol atau sangat rendah, sehingga walaupun mereka berkerja, usaha tersebut tidak akan menaikkan tingkat produksi. Sedangkan pengangguran musiman adalah

pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu, yaitu pada bulan – bulan dimana kegiatan pertanian atau kegiatan produksi lainnya lebih sedikit dilakukan dibandingkan dengan masa-masa lainnya (Sukirno 2007 h. 69)

Menurut Sumarsono (2003, h. 4) pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacah dan berusaha memperoleh pekerjaan. Sedangkan orang yang bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan paling sedikit dua hari dalam seminggu sebelum hari pencacahan dinyatakan sebagai bekerja.

Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno, (2006: 328-331) jenis-jenis pengangguran dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan cirinya.

Penganggran Berdasarkan Penyebabnya

- a. Pengangguran Friksional adalah pengangguran normal yang terjadi jika ada 2 -3 persen maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh.
- b. Pengangguran Siklikal adalah pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi

sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja.

- c. Pengangguran Struktural adalah pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan.
- d. Pengangguran Teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri

1. Pengangguran Berdasarkan Cirinya

- a. Pengangguran musiman, adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, dan sebagainya.
- b. Pengangguran terbuka, pengangguran yg terjadi karena penambahan lapangan kerja lebih rendah daripada penambahan pencari kerja.
- c. Pengangguran tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.

- d. Setengah menganggur, yang termasuk golongan ini adalah pekerja yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari) disebut *underemployment*.

KEMISKINAN

Pengertian Kemiskinan

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, .pertahanan, sumberdaya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Indikator Kemiskinan

Indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-

rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kolori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek- aspek material saja, tetapi juga berhubungan dengan aspek non material. Dengan demikian mengukur kemiskinan sebagai suatu fenomena atau gejala yang pada dasarnya bersifat *multi-faset* atau *integratetd proverty*. Jadi kemiskinan bukan hanya memiliki suatu dimensi yang bersifat moneteris saja, melainkan juga dimensi *non* moneteris (Adisasmita, 2005: 193).

Ukuran Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan .yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan

karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut BPS (2013: 97) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya pangan dan gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan minyak dan lemak dan lain lain. Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari. Kategori kemiskinan menurut BPS dapat dilihat beberapa aspek diantaranya berikut :

1. lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan,

buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2004, h. 157) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau

keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adaya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

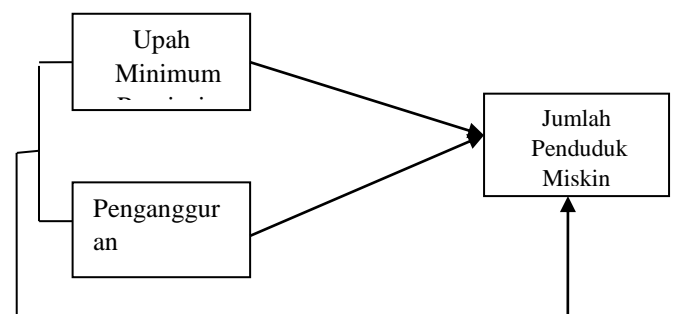
Kerangka Konseptual

Pada bab ini akan dijelaskan kerangka konsep penelitian, hipotesis penelitian dan definisi oprasional. Kerangka konsep penelitian akan membantu peneliti dalam menghubungkan hasil penemuan dengan teori. Dengan demekian krannga konsep diperlukan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan suatu penelitian yang dikembangkan dari tinjaun teori sehingga mudah dipahami. Gambaran mengenai variabel penelitian dapat diperoleh melalui kerangka konsep, yang dikategorikan kedalam kelompok *dependent*,

independent dan confounding. Hipotesis penelitian merupakan pernyataan sementara peneliti yang akan diuji kebenarannya yang dinyatakan di hipotesis alternatif, sebagai suatu petunjuk dalam mengidentifikasi dan menginterpretasikan suatu hasil. Definisi oprasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari variabel yang diteliti untuk memperjelas maksud dari penelitian yang dilakukan.

Gambar 1

Kerangka Pemikiran Toritis



DESKRIPSI PENELITIAN

Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2018

Dalam perumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) Pemerintah Daerah membentuk dewan pengupahan Provinsi yang beranggotakan dari wakil pemerintah, kantor/dinas, unit terkait, organisasi serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan akademisi. Dewan pengupahan Provinsi berfungsi melakukan survei dan pendataan harga-harga bahan pokok di daerah sekitarnya,

dalam komponen kelompok-kelompok kebutuhan hidup layak yang antara lain meliputi komponen sandang, pangan, perumahan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan. Setelah data terhimpun kemudian dikaji, dihitung, dan dianalisa apakah perusahaan-perusahaan mampu membayar kenaikan yang akan ditetapkan. Kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan inflasi, dan faktor-faktor lain. Perkembangan tingkat upah di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2008-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Upah Minimum Provinsi Jawa Timur

| NO | Tahun | UMP (Rp) | Pertumbuhan (%) |
|----|-------|-----------|-----------------|
| 1 | 2008 | 620.000 | - |
| 2 | 2009 | 920.000 | 48,39 |
| 3 | 2010 | 1.000.000 | 8,70 |
| 4 | 2011 | 1.200.000 | 20,00 |
| 5 | 2012 | 1.300.000 | 8,33 |
| 6 | 2013 | 1.350.000 | 3,85 |
| 7 | 2014 | 1.380.000 | 2,22 |
| 8 | 2015 | 1.400.000 | 1,45 |

| | | | |
|----|------|-----------|-------|
| 9 | 2016 | 1.550.000 | 10,71 |
| 10 | 2017 | 1.750.000 | 12,90 |
| 11 | 2018 | 1.900.000 | 8,57 |

Sumber : Badan Pusat Statistiik Provinsi Jawa Timur (2008-2018)

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa perkembangan UMP di Jawa Timur sejak tahun 2008-2018 cenderung meningkat dimana pada tahun 2008 sebesar Rp 620.000 angka ini meningkat menjadi Rp. 920.000 ditahun 2009 atau tumbuh sebesar 48,39 persen. Kemudian pada tahun berikutnya yakni

tahun 2010 pemerintah kembali menaikkan UMP menjadi Rp 1.000.000 peningkatan UMP initerus terjadi hiingga tahun 2018 yaitu Rp 1.900.000, UMP berlaku untuk semua peekerja yang ada di Jawa Timur, baik bekerja di instansi swasta, Pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.

Jumlah Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2018

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 mencapai 237.061, jumlah ini menurun pada tahun 2018 menjadi 148

123 jiwa. Hal ini di perlihatkan pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Jumlah Pengangguran Provinsi Jawa Timur

| No | Tahun | Pengangguran (Jiwa) | Pertumbuhan (%) |
|----|-------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2008 | 237.061 | - |
| 2 | 2009 | 211.356 | -10,84 |
| 3 | 2010 | 183.822 | -11,61 |
| 4 | 2011 | 163.868 | -8,42 |
| 5 | 2012 | 173.624 | 4,12 |
| 6 | 2013 | 166.275 | -3,10 |
| 7 | 2014 | 171.050 | 2,01 |
| 8 | 2015 | 164.407 | -2,80 |
| 9 | 2016 | 177.828 | 5,66 |
| 10 | 2017 | 147.031 | -12,99 |
| 11 | 2018 | 148.123 | 0,46 |

Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2008-2018)

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa terjadinya fluktuasi pengangguran di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2008-2018 dimana pada tahun 2008 jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur 237.061 jiwa, jumlah ini menurun dalam tiga tahun berikutnya yakni tahun 2009-2011 dimana pada tahun 2009 jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur sebesar 211.356 jiwa, dan hingga tahun 2011 jumlah pengangguran di

Provinsi Jawa Timur tercatat 163.868 jiwa atau turun 8,42 persen dari tahun 2010. Namun pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 171.050 kemudian turun kembali pada tahun 2013, 166.275 jiwa, dan hingga tahun 2018 jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 148.123 jiwa meningkat 0,46 persen dari pada tahun 2014.

Dalam upaya menurunkan jumlah pengangguran baik pemerintah pusat maupun daerah harus dapat mengarahkan dan merencanakan secara khusus program-program yang menciptakan tenaga kerja baru ataupun mempertahankan lapangan kerja yang sudah ada. Dengan pemberian dan pembukaan lapangan kerja kepada masyarakat. Pemerintah harus dapat menggerakkan ekonomi daerah yang melibatkan masyarakat sehingga benar-benar terjadi pembangunan Jawa Timur. Masyarakat agar dapat dilibatkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Jawa Timur sehingga disamping fisik, kesempatan kerja dan ekonomi rakyat juga ikut ter rehabilitasi. Membuka kesempatan kerja baru ataupun memberikan kemampuan untuk bekerja sendiri dan mempekerjakan orang lain di Jawa Timur, tidak kalah pentingnya dari bantuan fisik yang sedang dilakukan (meyediakan atau membuka usaha baru) Pengangguran bisa di

sebabkan karena mereka tidak memiliki aset, modal ataupun keterampilan yang di butuhkan untuk bekerja ataupun mendapatkan pekerjaan. Maka Pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka yang diiringi dengan peyediaan sarana dan fasiilitas sebagai *follow up* dari meningkatnya kemampuan dan keterampilan mereka

Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal di Provinsi Jawa Timur merupakan solusii jangka panjang menanganii pengangguran, namun yang terpenting sekarang adallah bagaimana dalam jangka pendek. Kredii kredit usaha kecil ataupun informal untuk memulai usaha kecil harus dapat digulirkan untuk menggerakkan aktifitas ekonomi rakyat

PEMBAHASAN HASIL

Analisis Regresi linier Berganda

Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3
 .Coefficients

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 25,308 | 5,060 | | 5,001 | 0,001 |
| X 1 | -0,515 | 0,126 | -1,320 | -4,082 | 0,004 |
| X 2 | 0,356 | 0,279 | ,413 | 1,278 | 0,237 |

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 25,308 - 0,515 X_1 + 0,356 X_2$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 25,308 nilai konstanta ini menyatakan bahwa apabila variabel bebas yakni UMP dan jumlah pengangguran sama dengan nol, maka tiingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 25,308 persen.
2. Koefisien regresi variabel UMP (X_1) sebesar -0,515 artinya bahwa setiap kenaikan UMP 1 persen maka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menurun sebesar 0,515 persen.
3. Koefisien regresi variabel pengangguran (X_2) sebesar 0,356 yang berarti bahwa setiap kenaikan jumlah pengangguran 1 persen maka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi 0,356 persen.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikasi (t)

Berdasarkan Tabel 4.3.1 tersebut, variabel UMP (X_1) diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yakni sebesar $-4,082 < -1,860$ pada $\alpha 0,05$ dengan derajat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,04 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa secara parsial variabel UMP (X_1) berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan tingginya tingkat upah mendorong tenaga kerja untuk menerima pekerjaan yang tawarkan perusahaan karena mereka menganggap upah yang diberikan mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kemudian variabel pengangguran diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yakni sebesar $1,278 < 1,860$, pada $\alpha 0,5$ dimana signifikansinya lebih besar dari 0,05 ($0,235 > 0,05$). Maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Artinya bahwa secara paria variabel pengangguran tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tiimur. Hal ini disebabkan oleh pengangguran yang terjadi di Provinsii Jawa Timur hanya bersifat musiman bukan pengangguran permanen b. Uji Simultan (F)

Uji signifikasi (f)

Uji F ini digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yang dimasukkan kedalam model ini yakni Upah

Minimum Provinsi (UMP) dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis nilai F hitung dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. ANOVA

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | ,136 | 2 | ,068 | 33,714 | ,000 ^b |
| Residual | ,016 | 8 | ,002 | | |
| Total | ,152 | 10 | | | |

a. Dependent Variable : Y

b. Predictors : (Constant), X2, X1

Berdasarkan tabel 4.3.2 bahwa nilai F_{hitung}

33,714 dan F_{tabel} 4,46 jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$

dimana signifikannya lebih kecil

dari 0,05 (0,0000,05). Maka H_0 diitolak

dan H_1 diterima. Artinya bahwa kedua

variabel bebas yang dimasukkan kedalam

model ini yakni Upah Miimum Provinsi

(UMP) dan pengangguran secara bersama-

sama (serempak) berpengaruh nyata

terhadap kemiiskinan di Provinsi Jawa

Tiimur

Analisis Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui tiingkat kerentanan serta arah hubungan antara UMP dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Proviinsi Jawa Timur. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini.

Tabel 5. Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of The Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,945 ^a | ,894 | ,867 | ,0449165828 |

a. Predictors (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable : Y

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,945 yang artinya bahwa adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas yakni UMP dan jumlah pengangguran dengan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 94,5 persen. Selanjutnya diperoleh nilai koefisien determinasi *R Adjusted*, sebesar 0,867, hal ini mengandung arti bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 86,7 persen dipengaruhi oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pengangguran dan sisanya sebesar 13,3 persen di jelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi linier berganda yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel UMP (X_1) diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yakni ($-4,082 < -1,860$) pada $\alpha 0,05$. Maka H_0 diteriima dan H_1 ditolak. Artinya bahwa secara parsial variabel

UMP (X_1) berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskiin di Provinsi Jawa Timur. Kemudian variabel pengangguran diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yakni sebesar $1,278 < 1,860$ Pada $\alpha 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa secara parsial variabel pengangguran tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

- Hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} 33,741 dan F_{tabel} 4,46 jadi $F_{hitung} >$

F_{tabel} dimana signifikannya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang berarti bahwa kedua variabel bebas yang dimasukkan kedalam model ini yakni Upah Minimum Provinsi Jawa Timurdan pengangguran secara bersama-sama (serempak) berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur

- Nilai koefisien determinasi *R Adjusted*, sebesar 0,867 artinya bahwa pengangguran di Provinsi Jawa Timur sebesar 86,7 persen dipengaruhi oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pengangguran dan sisanya sebesar

13,3 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis ajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan upah minimum harus tetap diberlakukan dan tingkat upahnya dinaikan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk melindungi pekerja. Karena diharapkan dengan upah minimum yang ada di suatu daerah dapat melindungi para pekerjanya dari kemiskinan, karena dengan upah minimum seorang pekerja menerima upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak serta dapat terhindar dari garis kemiskinan. Upah minimum Kota/Kabupaten tiap tahunnya naik sesuai dengan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah.
2. Untuk mengurangi tingkat pengangguran pemerintah dan pihak yang terkait diharapkan melakukan berbagai upaya diantaranya adalah memberikan izin pendirian usaha agar nantinya dapat menyerap tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Survei Tenaga Kerja Nasional*. Jakarta.
2013. *Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia*.
- BPS. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2004. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Bappenas. Jakarta.
- Gilarso. 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Kanisius. Yogyakarta.
- Hasan, Iqbal. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Edisi Kedua. Bumi Aksara Jakarta.
- Husaini, Usman. et.al. 2006. *Pengantar Statistik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Istifaiyah. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi Keenambelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Mahyudi, Ahmad. 2004. *Ekonomi Pembangunan & Analisis Data Empiris*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Pengantar Ekonomii Makro*. Edisi -3. Selemba Empat. Jakarta.
- Maulana, Hafihz. 2013. *Evaluasi Kinerja Ekonomi Aceh*.

- <http://www.academia.edu> (diakses Juni 2014)
- Prastyo. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro . Semarang.
- Riva, dkk. 2014. *Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau*. Jurnal. Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.
- Siregar, Hermanto. 2009. *Makro-mikro Pembangunan*. IPB Pres. Kampus IPB Dermaga Bogor. Indonesia.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makroekonomi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sumarsono, Sonny, (2003). *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Supranto, J. 2004. *Statistik*. Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta.
- Tadoro dan Smith 2006. *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga*. Edisi Sembilan. Erlangga. Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. 2012. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Graha Indonesia.

